

ANALISIS KETIMPANGAN WILAYAH ANTAR KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2011-2015

Lisa Hermawati¹, Misnalia²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Baturaja

¹ogu_bta@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study is to determine the extent of regional imbalance between regency/city in south Sumatra province. The data used are PDRB data of Regency/City of South Sumatra Province and Regency/City PDRB data at constant value 2010. Analysis tools used in this research are Analysis method of Williamson Index (WI), Gini Index Analysis. The results of this study explain that: (1) Williamson Index analysis of 17 districts/cities in South Sumatra Province results that from 17 districts/cities in South Sumatra Province only 5 districts/cities are very prevalent as it approaches to zero, Lahat Regency, Muara Enim Regency, Musi Rawas Regency, and East Oku District and also 12 other districts/cities are very uneven as it approaches 1. Based on Gini Index analysis from 17 districts/cities in South Sumatra Province, Gini Index calculation results that from 17 regencies/cities in South Sumatra Province there are only 10 regencies/cities in South Sumatra Province whose numbers range from zero (equal distribution) consist of Ogan Komering Ilir Regency, Banyuasin Regency, South Oku District, Ogan Ilir Regency, Empat Lawang District, Penulak Abab Lematang Ilir Regency, North Musi Rawas Regency, Palembang City, Lubuk Linggau City and City of Prabumulih. While 7 other regencies / cities are worth up to one (perfect inequality) such as Musi Rawas Regency, Muara Enim Regency, Ogan Komering Ulu Regency, East Ogan Komering Ulu Regency, Musi Banyuasin Regency and Pagar Alam City.

Keywords: GRDP, Williamson Index (Wi), Gini Index

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota diprovinsi sumatera selatan. Data yang digunakan yaitu data PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan data PDRB Kabupaten/Kota atas dasar harga konstan 2010. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Indeks Williamson (WI), Analisis Indeks Gini (IG). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: (1) analisis Indeks Williamson dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Hasil penghitungan Indeks Williamson bahwa dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan hanya 5 Kabupaten/Kota yang sangat merata bila mendekati nol, misalnya Kabupaten OKU, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Oku Timur. Dan 12 Kabupaten/Kota lainnya sangat timpang karena mendekati 1. Berdasarkan analisis Indeks Gini dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Hasil penghitungan Indeks Gini bahwa dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan hanya ada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang angka nya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) terdiri dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Oku Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau dan Kota Prabumulih. Sedangkan 7 Kabupaten/Kota lainnya nilainya hingga satu (ketimpangan sempurna) seperti Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Pagar Alam.

Kata Kunci: PDRB, Indeks Williamson (Wi), Indeks Gini

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus meningkat, dalam banyak kasus di negara berkembang, tidak otomatis menghilangkan ketimpangan dalam pembangunan (*disparity*). Ketimpangan pembangunan umumnya terjadi pada aspek pendapatan, spasial dan sektoral. Petunjuk awalnya adalah wilayah maju terus berkembang pesat meninggalkan wilayah terbelakang serta adanya sektor unggulan yang berkontribusi besar bagi pembangunan, sedangkan sektor non unggulan yang membebani. Ketimpangan pembangunan terjadi dalam skala lokal dan nasional. Ketimpangan pembangunan seringkali menjadi permasalahan serius dan apabila tidak mampu dieliminir secara hati-hati dapat menimbulkan krisis yang lebih kompleks seperti masalah kependudukan, ekonomi, sosial, politik dan lingkungan serta dalam konteks makro sangat merugikan proses dan hasil pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah.

Pembangunan wilayah, secara spasial tidak selalu merata. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan cepat, sementara daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber daya yang dimiliki, adanya kecenderungan penanam modal (investor) memilih daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, telekomunikasi, perbankan, asuransi dan tenaga kerja terampil. Selain itu adanya ketimpangan redistribusi pendapatan dari Berikut ini adalah data PDRB 17 Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011-2015.

Tabel 1. Data PDRB 17 Kabupaten /Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), Tahun 2011-2015

Nama 17 Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
Kabupaten Ogan Komering Ulu	7.007.376,5	7.376.00,0	7.704.609,7	7.987.733,2	8.230.963,1	7661337,9
Kabupaten Ogan Komering Ilir	13.354.396,4	14.230.587,8	15.135.833,1	15.902.779,9	16.668.448,5	75292045,7
Kabupaten Muara Enim	24.359.396	26.374.751	28.158.761	29.041.405	31.253.273	139187,586
Kabupaten Lahat	9.003.712	9.479.394	9.937.386	10.317.901	10.537.519	49275912
Kabupaten Musi Rawas	9.167.471,3	9.245.287,1	9.788.565,6	10.510.076,1	11.049.704,1	49761104,2
Kabupaten Musi Banyuasin	32.904.808,9	35.290.935,6	36.683.308,6	38.397.352,6	39.272.812,2	182549217,9

Nama 17 Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
Kabupaten Banyuasin	12.980.038,4	13.777.763,1	14.628.959,7	15.380.588,5	6.236.002,2	48374392,2
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	6.485.137,7	6.951.884,2	7.435.450,2	7.821.515,8	7.435.337	36129324,9
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	3.854.386,1	4.056.975,3	4.267.954,1	4.503.084,9	4.707.443,0	21389843,4
Kabupaten Ogan Ilir	4.740.501	5.121.358	5.492.925	5.852.728	6.122.370	27329,882
Kabupaten Empat Lawang	2.433.329,6	2.433.329,6	2.721.106,0	2.836.117,9	2.963.783,9	13387667
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	3.124.550	3.352.716	3.577.674	3.577.350	3.736.265	17368,555
Kabupaten Musi Rawas Utara	4.001.168,7	4.104.389,2	4.190.448,0	4.606.176,0	4.760.111,8	21662293,7
Kota Palembang	65.049.465,8	70.090.313,7	74.193.370,0	78.079.019,4	82.329.656,5	304692359,6
Kota Pagar Alam	1.633.681,8	1.809.050,4	1.977.947,2	2.133.099,9	2.279.641,0	7700320,4
Kota Lubuk Linggau	2.767.858,0	2.943.697,5	3.042.978,2	3.235.618,1	3.439.782,6	15429934,4
Kota Prabumulih	3.228.305,1	3.496.880,0	3.674.194,7	4.097.007,5	4.295.410,9	18791798,2

Sumber: BPS Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan 2011-2015 (data diolah 2017)


Tabel 1 menunjukkan bahwa perbedaan PDRB 17 kabupaten/kota sangat signifikan di lihat dari PDRB masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011-2015. Misalnya Kabupaten Empat Lawang paling terendah PDRB nya dibandingkan dengan Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan hanya mencapai 13387667 dan PDRB yang terbesar dari 17 Kabupaten / Kota adalah kota Palembang sebesar 304692359,6.

Berdasarkan uraian di atas maka di rumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sejauh mana ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dan apa yang menjadi penyebabnya.

LANDASAN TEORI

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya



kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Masing-masing dari ketiga komponen pokok dari definisi itu sangat penting di ketahui terlebih dahulu (Todaro, 2004: 99).

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor penting (Todaro, 2000:137), akumulasi modal (*capital accumulation*), pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, kemajuan teknologi termasuk didalamnya kemajuan teknologi yang bersikap netral, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, kemajuan teknologi yang hemat modal.

Teori Ketimpangan Wilayah

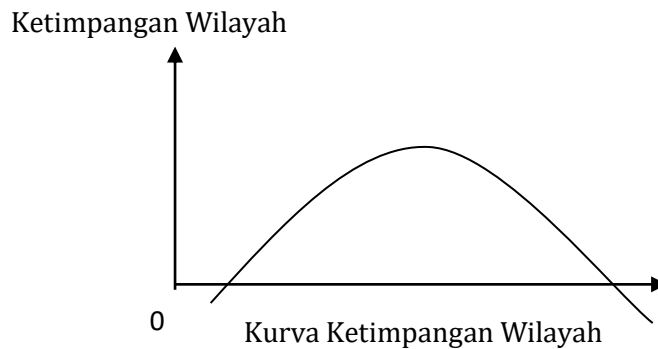
Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat masing –masing wilayah. Akibat perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*develoved relion*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloved region*).

Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah menurut (Sjafrizal, 2012:117-120) yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografi, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, kosentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Teori Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapa padat masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah relatif maju (*developed region*) dan wilayah relatif terbelakang (*underdeveloped region*). Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah ini selanjutnya membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan. Biasanya implikasi yang ditimbulkan adalah dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan implikasi politik dan ketenteraman masyarakat. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah ini perlu di tanggulangi

melalui formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Sjafrizal, 2012:107). Adapun model dikenal sebagai Hipotesis Neo-Klasik seperti Gambar 1.



Gambar 1. Tingkat Pembangunan Nasional

Sesuai dengan kesimpulan ini, hipotesis yang dapat di tarik untuk kegiatan penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, kemajuan teknologi, peningkatan investasi dan peningkatan jumlah dan tenaga kerja suatu wilayah berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Kedua, pada permulaan proses pembangunan, ketimpangan regional cenderung meningkat, tetapi setelah titik maksimum bila pembangunan terus dilanjutkan, maka ketimpangan pembangunan antardaerah akan berkurang dengan sendirinya (Sjafrizal, 2012:101).

Teori Penanggulangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Kebijakan dan upaya untuk menanggulangi ketimpangan pembangunan wilayah sangat ditentukan oleh faktor yang menentukan terjadinya ketimpangan tersebut. Kebijakan yang dimaksudkan disini adalah merupakan upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan ketimpangan pembangunan antar daerah dalam suatu negara atau wilayah. Kebijakan tersebut antara lain: penyebaran pembangunan prasarana perhubungan, Mendorong transmigrasi dan migrasi spontan, penembangan pusat pertumbuhan, dan pelaksanaan otonomi daerah.

Hipotesis Neo-Klasik

Menurut hipotesis Teori Pertumbuhan Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu Negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesis ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan

pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada Negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah.

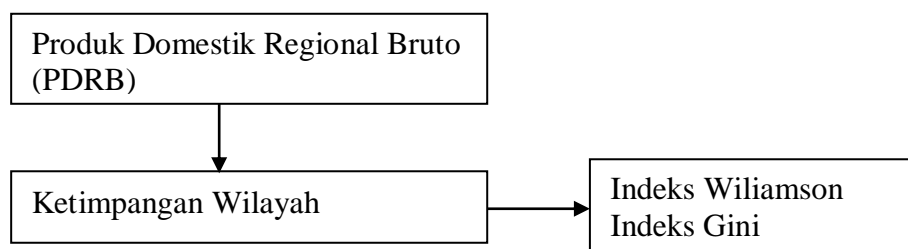
Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Wilayah

Menurut Kwik Gie (2009), pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini ternyata di barengi oleh ketimpangan yang sangat besar antara Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur, antara perusahaan besar perusahaan kecil, antara perkotaan pedesaan, serta antara kelompok etnis yang satu dengan kelompok etnis lainnya. Masalah ketimpangan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara miskin dan berkembang ketimpangan terjadi akibat adanya distribusi pendapatan mengandung dua aspek pertama adalah bagaimana menaikkan tingkat kesejahteraan mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan, aspek kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antara penduduk atau rumah tangga.

Produk Domestik Regional Bruto

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statitik (2015) yaitu merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan diwilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). Walaupun mempunyai pendekatan yang berbeda namun akan memberikan hasil perhitungan yang sama. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Kerangka pemikiran ini dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 Skema Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus mengenai Ketimpangan Wilayah antar Kabupaten Di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yaitu yang di peroleh dari data PDRB dan data jumlah penduduk (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan; <http://sumsel.bps.go.id>).

Metode Analisis

Beberapa metode analisis data yang digunakan yaitu:

a. Indeks Williamson

Indeks Williamson adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur penyebaran (dispersi) tingkat pendapatan per kapita daerah relatif terhadap rata-rata nasional. Indeks ini menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar karena yang di perbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok yang diformulasikan sebagai berikut.

Bila mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila mendekati nol berarti sangat merata.

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan :

Y_i : PDRB per kapita di kabupaten/kota i,

Y : PDRB per kapita rata-rata provinsi Sumatera Selatan

f_i : Jumlah penduduk di Kabupaten/kota i

n : merupakan Jumlah penduduk Propinsi Sumatera Selatan

b. Indeks Gini

Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Menurut todaro (2007) formulasi Indeks Gini atau Gini Rasio adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n fP_i (F_{ci} + F_{ci-1})$$

Dimana:

GR = Indeks Gini

fP_i = frekuensi penduduk dalam kelas ke-i

F_{ci} = frekuensi kumulatif dan total pengeluaran atau pendapatan pada kelas ke-i

F_{ci-1} = frekuensi kumulatif dan total pengeluaran atau pendapatan pada kelas ke($i-1$)

Batasan Operasional Variabel

Penulis memberikan batasan definisi operasional sebagai berikut :

Tabel 2 Batasan Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Produk Domestik Regional Bruto	Produk Domestik Regional Bruto adalah besarnya nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan usaha yang berada di dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun), atau merupakan barang atau jasa akhir yang digunakan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, investasi, dan ekspor.	Data PDRB 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015
Ketimpangan Wilayah	Ketimpangan pembangunan atau disparitas adalah perbedaan pembangunan antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan.	Data PDRB 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Sumatera Selatan secara geografis terletak antara 1 derajat sampai 4 derajat Lintang Selatan dan 102 sampai 106 derajat Bujur Timur dengan luas daerah seluruhnya 87.017.41 km². Secara administratif, Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17, rinciannya adalah 13 Pemerintah Kabupaten, dan 4 Pemerintah Kota. Pembagian Kabupaten/ Kota tersebut pada Tabel 3.

Tabel 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN /KOTA	IBU KOTA
1	Kabupaten Banyuasin	Pangkalan Balai
2	Kabupaten Empat Lawang	Tebing Tinggi
3	Kabupaten Muara Enim	Muara Enim
4	Kabupaten Lahat	Lahat
5	Kabupaten Musi Banyuasin	Sekayu
6	Kabupaten Musi rawas	Muara Beliti
7	Kabupaten MUSI Rawas	Rupit
8	Kabupaten Ogan Ilir	Indralaya
9	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Kota Kayu Agung
10	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Baturaja



NO	KABUPATEN /KOTA	IBU KOTA
11	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Muaradua
12	Kabupaten Penukal Abab Ilir	Talang Tubi
13	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Martapura
14	Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau
15	Kota Pagar Alam	Pagar Alam
16	Kota Palembang	Palembang
17	Kota Prabumulih	Prabumulih

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 4 Indeks Williamson 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015

NAMA 17 KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN	2011	2012	2013	2014	2015	KET
Kabupaten Ogan Komering Ulu	2,31	5,72	4,41	2,55	1,75	Sangat Merata
Kabupaten Ogan Komering Ilir	4,75	4,62	4,48	4,37	4,26	Sangat Timpang
Kabupaten Muara Enim	8,75	8,44	8,18	8,01	1,22	Sangat Merata
Kabupaten Lahat	1,54	1,50	1,46	1,44	1,42	Sangat Merata
Kabupaten Musi Rawas	2,22	2,21	2,16	2,08	2,02	Sangat Timpang
Kabupaten Musi Banyuasin	8,88	8,60	8,44	8,24	8,14	Sangat Timpang
Kabupaten Banyuasin	2,49	2,38	2,26	2,16	3,53	Sangat Timpang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	1,87	2,38	-0,00	1,71	2,67	Sangat Merata
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	6,90	6,74	6,57	6,40	6,25	Sangat Timpang
Kabupaten Ogan Ilir	9,07	8,76	1,34	8,20	7,99	Sangat Timpang
Kabupaten Empat Lawang	2,52	2,52	4,02	4,73	5,57	Sangat Timpang
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	2,44	3,15	5,11	2,29	2,24	Sangat Timpang
Kabupaten Musi Rawas Utara	3,39	3,35	3,31	3,16	3,10	Sangat Timpang
Kota Palembang	3,54	3,38	3,26	3,16	3,04	Sangat Timpang
Kota Pagar Alam	7,61	5,57	6,77	6,41	6,08	Sangat Timpang
Kota Lubuk Linggau	2,70	2,62	2,58	2,50	2,42	Sangat Timpang
Kota Prabumulih	2,70	2,61	2,55	2,41	2,34	Sangat Timpang

Sumber : Data diolah 2017

Berdasarkan Tabel 4 dari data PDRB 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penghitungan *Indeks Williamson* bahwa dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan hanya 5 Kabupaten/Kota yang sangat merata bila mendekati nol, misalnya Kabupaten OKU, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Oku Timur. Sedangkan 12 Kabupaten/Kota lainnya sangat timpang karena mendekati 1.

Tabel 5 *Indeks Gini* 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015

NAMA 17 KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Ogan Komering Ulu	-	4,96	5,20	2,38	3,11
Kabupaten Ogan Komering Ilir	-	2,14	1,22	1,35	2,52
Kabupaten Muara Enim	-	3,89	4,18	4,39	4,63
Kabupaten Lahat	-	7,19	7,55	7,87	8,11
Kabupaten Musi Rawas	-	5,64	1,06	1,13	6,76
Kabupaten Musi Banyuasin	-	4,10	4,33	4,52	4,67
Kabupaten Banyuasin	-	2,14	2,27	2,40	1,69
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	-	8,62	9,23	9,79	5,50
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	-	2,68	2,82	2,97	1,68
Kabupaten Ogan Ilir	-	3,98	4,28	4,58	2,61
Kabupaten Empat Lawang	-	1,14	1,21	1,30	1,36
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	-	6,38	6,46	1,24	1,27
Kabupaten Musi Rawas Utara	-	1,58	1,62	1,72	1,83
Kota Palembang	-	2,10	2,24	2,37	2,49
Kota Pagar Alam	-	4,56	5,01	5,44	5,84
Kota Lubuk Linggau	-	1,23	1,29	1,35	1,44
Kota Prabumulih	-	1,17	1,25	1,34	1,46

Sumber : Data diolah 2017

Berdasarkan tabel 5 dari hasil penghitungan *Indeks Gini* bahwa dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan hanya ada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) terdiri dari Kabupaten Ogan Komering

Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Oku Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau dan Kota Prabumulih. Sedangkan 7 Kabupaten/Kota lainnya nilainya hingga satu (ketimpangan sempurna) seperti Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Pagar Alam.

Tabel 7 Kesamaan dan Perbedaan hasil analisis Indeks Williamson dan Indeks Gini

INDEKS WILLIAMSON	KRITERIA	INDEKS GINI	KRITERIA
Kabupaten Ogan Komering Ulu	Merata	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Timpang
Kabupaten Ogan Komering Ilir	Timpang	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Merata
Kabupaten Muara Enim	Merata	Kabupaten Muara Enim	Timpang
Kabupaten Lahat	Merata	Kabupaten Lahat	Timpang
Kabupaten Musi Rawas	Timpang	Kabupaten Musi Rawas	Timpang
Kabupaten Musi Banyuasin	Timpang	Kabupaten Musi Banyuasin	Timpang
Kabupaten Banyuasin	Timpang	Kabupaten Banyuasin	Merata
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Merata	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Timpang
Kabupaten Oku Selatan	Timpang	Kabupaten Oku Selatan	Merata
Kabupaten Ogan Ilir	Timpang	Kabupaten Ogan Ilir	Merata
Kabupaten Empat Lawang	Timpang	Kabupaten Empat Lawang	Merata
Kabupaten PALI	Timpang	Kabupaten PALI	Merata
Kabupaten Musi Rawas Utara	Timpang	Kabupaten Musi Rawas Utara	Merata
Kota Palembang	Timpang	Kota Palembang	Merata
Kota Pagaralam	Timpang	Kota Pagaralam	Timpang
Kota Lubuklinggau	Timpang	Kota Lubuklinggau	Merata
Kota Prabumulih	Timpang	Kota Prabumulih	Merata



Tabel 8 Perbandingan (Kekuatan dan Kelemahan Indeks Williamson dan Indeks Gini)

INDEKS WILLIAMSON	INDEKS GINI
Kekuatan dan Kelemahan	Kekuatan dan Kelemahan
<p>Kekuatan bahwa besarnya <i>Index Williamson</i> ini bernilai positif dan berkisar antara angka nol sampai dengan satu. Semakin besar nilai index ini (mendekati angka satu) berarti semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut. Sebaliknya semakin kecil nilai index ini (mendekati angka nol) berarti semakin merata tingkat pemerataan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut.</p> <p>Index Williamson ini mempunyai kelemahan yakni penghitungan ini baru menggambarkan tingkat pendapatan secara global sejauh mana dan berapa besar bagian yang diterima oleh kelompok yang berpendapatan rendah atau miskin bertambah tidak tampak dengan jelas. Serta memiliki kelemahan sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan artinya apabila ukuran wilayah yang digunakan berbeda maka akan berpengaruh terhadap hasil perhitungannya, namun cukup lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah.</p>	<p>Keuntungan utama Koefisien Gini adalah bahwa hal itu adalah ukuran ketimpangan melalui suatu analisis rasio. Rasio disini berarti bahwa koefisien gini hanya merupakan perbandingan 2 buah angka sehingga hal ini membuat mudah diinterpretasi, dan menghindari referensi dengan rata-rata statistik atau posisi tidak representatif dari sebagian besar penduduk, seperti pendapatan per kapita atau produk domestik bruto. Kesederhanaan Gini membuatnya mudah digunakan untuk perbandingan di berbagai negara dan juga memungkinkan perbandingan distribusi pendapatan di seluruh kelompok yang berbeda serta negara-negara, misalnya koefisien Gini untuk daerah perkotaan berbeda dari daerah pedesaan di banyak negara. kekurangan dari koefisien Gini sebagai ukuran ketimpangan. Keterbatasan Gini sebagian besar terletak pada sifat relatif: Ini kehilangan informasi tentang pendapatan nasional dan pribadi mutlak. Negara-negara mungkin memiliki koefisien Gini identik (sama), tetapi sangat berbeda dalam kekayaan. Kebutuhan dasar mungkin sama (tersedia untuk semua) di negara kaya, sementara di negara miskin, bahkan kebutuhan dasar yang tidak setara tersedia.</p>

	<p>Dengan mengukur ketimpangan pendapatan, Gini mengabaikan efisiensi diferensial penggunaan pendapatan rumah tangga. Dengan mengabaikan kekayaan (kecuali karena memberi kontribusi untuk pendapatan) Gini dapat membuat penampilan ketimpangan ketika orang dibandingkan adalah pada tahap yang berbeda dalam hidup mereka.</p>
--	---

Kegunaan menganalisis ketimpangan adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan tentang ketimpangan wilayah antar Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu juga untuk mengetahui keadaan perekonomian, pendapatan per kapita antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, dengan menganalisis ketimpangan dapat mendorong pemerintah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas pembangunan ekonomi daerah termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan karena adanya wewenang yang ada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

KESIMPULAN


Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis ketimpangan wilayah antar Kabupaten/Kota tahun 2011-2015 maka di peroleh kesimpulan dan saran sebagai berikut.

1. Berdasarkan analisis *Indeks Williamson* dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Hasil penghitungan *Indeks Williamson* bahwa dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan hanya 4 Kabupaten/Kota yang sangat merata yang angkanya berkisar antara nol, misalnya Kabupaten OKU, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Oku Timur. Dan 13 Kabupaten/Kota lainnya sangat timpang.
2. Berdasarkan analisis *Indeks Gini* dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Hasil penghitungan *Indeks Gini* bahwa dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan bahwa hanya ada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang angka nya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) terdiri dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Oku Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten

Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau dan Kota Prabumulih. Sedangkan 7 Kabupaten/Kota lainnya nilainya hingga satu (ketimpangan sempurna) seperti Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Pagar Alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2015. *Tinjauan PDRB Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang.
- Badan Pusat Statistik. 2002:1. *Tinjauan PDRB Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang.
- Boediono. 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Jhingan, ML. 2000. *Ekonomi Pembangunan. Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kurniasih, Panca Erni. 2013. *Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznets*. Hal 36-48. Pontianak: Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Produk Domestik Regional Bruto. 2015. Kota Pagar Alam. Menurut Lapangan Usaha. [Http://pagaralamkota.bps.go.id](http://pagaralamkota.bps.go.id)
- Produk Domestik Regional Bruto. 2015. Kota Lubuklinggau. Menurut Lapangan Usaha. [Http://lubuklinggaukota.bps.go.id](http://lubuklinggaukota.bps.go.id)
- Produk Domestik Regional Bruto. 2011-2015. Kota Palembang. Menurut Lapangan Usaha. [Http://palembangkota.bps.go.id](http://palembangkota.bps.go.id)
- Produk Domestik Regional Bruto. 2011-2015. Kota Prabumulih. Menurut Lapangan Usaha. [Http://prabumulihkota.bps.go.id](http://prabumulihkota.bps.go.id)
- Produk Domestik Regional Bruto. 2011-2015. Kabupaten Oku Selatan. Menurut Lapangan Usaha. [Http://okuselatankab.bps.go.id](http://okuselatankab.bps.go.id)
- Produk Domestik Regional Bruto. 2011-2015. Kabupaten Penukal Abab Lematang. Menurut Lapangan Usaha. [Http://muaraenimkab.bps.go.id](http://muaraenimkab.bps.go.id)
- Produk Domestik Regional Bruto. 2011-2015. Kabupaten Empat Lawang. Menurut Lapangan Usaha. [Http://www.empatlawangkab.bps.go.id](http://www.empatlawangkab.bps.go.id)
- Produk Domestik Regional Bruto. 2011-2015. Kabupaten Banyuasin. Menurut Lapangan Usaha. [Http://banyuasinkab.bps.go.id](http://banyuasinkab.bps.go.id)
- Produk Domestik Regional Bruto. 2011-2015. Kabupaten Lahat. Menurut Lapangan Usaha. [Http://lahatkab.bps.go.id](http://lahatkab.bps.go.id)
- Produk Domestik Regional Bruto. 2011-2015. Kabupaten Musi Rawas Utara. Menurut Lapangan Usaha. [Https://musirawasutarakab.bps.go.id](https://musirawasutarakab.bps.go.id)
- Produk Domestik Regional Bruto. 2011-2015. Kabupaten Musi Rawas. Menurut Lapangan Usaha. [Https://musirawaskab.bps.go.id](https://musirawaskab.bps.go.id)

- 
- Produk Domestik Regional Bruto. 2011-2015. Kabupaten Ogan Komering Ilir. Menurut Lapangan Usaha. [Http://okikab.bps.go.id](http://okikab.bps.go.id)
- Produk Domestik Regional Bruto. 2011-2015. Kabupaten Ogan Komering Ulu. Menurut Lapangan Usaha. [Http://okukab.bps.go.id](http://okukab.bps.go.id)
- Produk Domestik Regional Bruto. 2011-2015. Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut Lapangan Usaha. [Http://musibanyuasinkab.go.id](http://musibanyuasinkab.go.id)
- Produk Domestik Regional Bruto. 2011-2015. Kabupaten Ogan Ilir. Menurut Lapangan Usaha. [Http://oganylirkab.bps.go.id](http://oganylirkab.bps.go.id)
- Produk Domestik Regional Bruto.2011-2015. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Menurut Lapangan Usaha. [Http://okutimurkab.bps.go.id](http://okutimurkab.bps.go.id)
- Produk Domestik Regional Bruto. 2011-2015. Kabupaten Muara Enim. Menurut Lapangan Usaha. [Http://muaraenimkab.bps.go.id](http://muaraenimkab.bps.go.id)
- P.Todaro Michael. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.